



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 22 Desember 2014

Halaman: 17

2015, Biaya Operasional Pendidikan Naik

■ Yulianingsih

Besaran BOP diberikan tidak sama untuk semua jenjang pendidikan.

YOGYAKARTA — Beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua siswa di Kota Yogyakarta pada 2015 mendatang akan semakin ringan. Pasalnya, Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan setempat akan menaikkan bantuan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi sekolah melalui APBD.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana mengatakan, anggaran untuk BOP di Kota Yogyakarta pada 2015 sebesar Rp 77 miliar. "Dana ini digunakan untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua siswa atau

wali," katanya, Ahad (21/12).

Dikatakan, besaran BOP diberikan tidak sama untuk semua jenjang pendidikan. Sebelumnya untuk siswa SMAN, besaran BOP yang diberikan ke sekolah secara langsung sebanyak Rp 1,8 juta per siswa. Namun pada 2015 mendatang BOP yang diberikan ke SMAN

naik menjadi Rp 2,2 juta per siswa. Adapun di tingkat SMKN, dari Rp 1,6 juta menjadi Rp 1,9 juta per siswa. Kenaikan BOP itu membuat biaya SPP SMAN/SMKN di Kota Yogyakarta juga menyesuaikan dengan penerapan batas maksimal besaran SPP bulanan. "BOP dalam satu tahun anggaran," kata Edy, menambahkan.

Dikatakan, pada 2014 ketentuan biaya SPP SMAN maksimal Rp 80 ribu per bulan per siswa dan SMKN Rp 40 ribu per bulan per siswa. Untuk 2015, sebagai konsekuensi dari penambahan dana BOP ke sekolah, biaya SPP SMAN maksimal Rp 40 ribu per bulan per sis-

wa dan SMKN Rp 25 ribu per bulan per siswa.

Penerapan kebijakan ini berlaku per Januari 2015. "Dengan begitu, jika siswa SMKN menabung sehari Rp 1.000 maka cukup untuk membayar SPP," katanya.

Selain BOP, pada tahun depan biaya investasi sekolah atau biaya uang gedung SMAN dan SMKN juga akan ditanggung Pemkot Yogyakarta. Kebijakan itu merupakan hasil pembahasan antara pemkot dan DPRD setempat. Hal ini mempertimbangkan gedung merupakan aset pemerintah, sehingga tidak dibebankan ke siswa.

Edy mengemukakan biaya gedung sekolah itu menjadi kewenangan Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Meski demikian biaya pendidikan tetap perlu ada yang ditanggung sebagian oleh siswa. "Untuk peningkatan sumber daya manusia sekolah tetap ada sharing biaya dengan siswa," ujarnya.

Sementara bagi siswa miskin pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS), katanya, selama ini Pemkot Yogyakarta juga telah memberikan akses melalui Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) JPD, Disdik Kota Yogyakarta, Suryatni mengatakan JPD bagi KMS sudah diberikan sejak 2007.

"Di manapun siswa pemegang KMS sekolah, baik di dalam Kota Yogyakarta maupun luar kota baik negeri atau swasta, ada jaminan pendidikan," kata Suryatni.

Tahun ini, papar dia, besaran JPD KMS untuk TK dan SD negeri Rp 700 ribu per siswa per tahun. Sedangkan TK dan SD swasta Rp 1,4 juta per siswa per tahun. Untuk SMP Rp 800 ribu per siswa per tahun, SMP swasta Rp 2,5 juta per siswa per tahun, SMA/SMK negeri Rp 3 juta per siswa per tahun, SMK swasta Rp 4,5 juta per siswa per tahun, dan SMA swasta Rp 3,5 juta per siswa per tahun. ■ *edy yusuf/asa*

Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005